



**KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DI DALAM MELAKSANAKAN  
TUGAS PEMERINTAHAN DI MASA PANDEMI  
DI DESA MULYOAGUNG KECAMATAN DAU KABUPATEN MALANG**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik (S-1)

Oleh:

**REYHAN TIO FUADDILA**  
**NPM : 21701091030**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG**  
**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**  
**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**  
**MALANG**  
**2022**

## ABSTRAKSI

Reyhan Tio Fuaddila, 2022, NPM 21701091030, Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang, Kepemimpinan Kepala Desa Di Dalam Melaksanakan Tugas Pemerintahan Di Masa Pandemi (Studi Kasus Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang). Dosen Pembimbing I : Dr. H. Slamet Muchsin, M,Si Dosen Pembimbing II : Taufiq Rahman Ilyas, S.AP., M.AP 90 Hal + xiii

---

Penelitian ini bertujuan satu untuk mengetahui bagaimana kepemimpinan kepala desa dalam melaksanakan tugas pemerintahan di era pandemi Covid-19 di Desa Mulyoagung. Kedua untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung berjalannya tugas pemerintahan di era pandemi Covid-19 di Desa Mulyoagung.

Dalam penelitian ini jenis yang digunakan jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Untuk teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu menggunakan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Melaksanakan Tugas Pemerintahan Di Era Pandemi Covid-19 di Desa Mulyoagung dalam pemberian kebijakan BLT-DD sudah mencakup kelompok sasaran,dengan adanya kampung tangguh Mulyoagung mampu mengatasi psikologis masyarakat akibat dampak pandemi Covid-19,pemerintah desa Mulyoagung sudah memberikan pelayanan masyarakat secara online dan of line dengan baik (2) faktor penghambat secara meliputi Pendataan masyarakat miskin yang terdampak tidak jelas sehingga pembagian dana BLT-DD tidak tepat sasaran, lambatnya pelayanan masyarakat secara online karena keterbatasan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur desa menjadi terhambat karena dana dialihkan untuk menangani masyarakat yang terdampak covid-19. Sedangkan faktor pendukung meliputi kebijakan penyaluran BLT-DD kepada masyarakat miskin yang terdampak Covid-19 dapat berjalan dengan baik dan sampai kelompok sasaran karena di dukung oleh data yang lengkap dan akurat. Dapat disimpulkan bahwa berjalannya tugas pemerintahan di era pandemi Covid-19 desa Mulyoagung yaitu dengan tersedianya sumber daya yang cukup dalam hal ini sumberdaya manusia dan financial maka tugas pemerintahan di desa Mulyoagung bisa berjalan dengan baik dalam penanggulangan pandemi, begitu juga dengan pelayanan masyarakatnya desa Mulyoagung sudah mempunyai web desa untuk melayani masyarakat secara online. Saran dari penulis Pelayanan masyarakat melalui media online seharusnya diberikan informasi yang jelas tentang layanan, syarat, mekanisme sehingga dapat mempermudah masyarakat dalam memperoleh layanan secara online. Begitu juga dalam pelayanan masyarakat secara langsung jangan mengabaikan protokol kesehatan.

**Kata Kunci : Kepemimpinan, Tugas Pemerintahan**

## ABSTRACT

Reyhan Tio Fuaddila, 2022, NPM 21701091030, State Administration Study Program, Faculty of Administrative Sciences, Islamic University of Malang, Leadership of Village Heads in Carrying Out Government Duties During a Pandemic (Case Study in Mulyoagung Village, Dau District, Malang Regency). Advisor I : Dr. H. Slamet Muchsin, M, Supervisor II : Taufiq Rahman Ilyas, S.AP., M.AP 90 Pages + xiii

---

This research has one aim to find out how the leadership of the village head is in carrying out government duties in the era of the Covid-19 pandemic in Mulyoagung Village. The second is to find out what are the inhibiting factors and supporting factors for the running of government tasks in the era of the Covid-19 pandemic in Mulyoagung Village.

In this study the type used is descriptive type with a qualitative approach. For the data collection technique used is to use interviews.

The results of the study show that (1) the leadership of the village head in carrying out governmental tasks in the era of the Covid-19 pandemic in Mulyoagung Village in providing the BLT-DD policy already includes the target group, with the existence of a tough village Mulyoagung is able to overcome the psychological impact of the community due to the impact of the Covid-19 pandemic, the government of Mulyoagung village has provided community services online and off line well (2) inhibiting factors including the collection of data on the affected poor is unclear so that the distribution of BLT-DD funds is not on target, the slowness of online community services due to limited human resources, development village infrastructure is hampered because funds are diverted to deal with communities affected by co-19. While the supporting factors include the policy of distributing BLT-DD to the poor who are affected by Covid-19 that can run well and reach the target group because it is supported by complete and accurate data. It can be concluded that the government's tasks were running during the Covid-19 pandemic era in Mulyoagung village, namely with the availability of sufficient resources, in this case human and financial resources, the government's tasks in Mulyoagung village could run well in handling the pandemic, as well as community services in Mulyoagung village. has a village web to serve the community online. Suggestions from the author Community services through online media should be given clear information about services, conditions, mechanisms so that it can make it easier for people to obtain services online. Likewise, in direct community service, don't ignore health protocols.

**Keywords:** *Leadership, Government Duties*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Di akhir tahun 2019 dunia dikejutkan oleh berjangkitnya wabah virus Corona atau dikenal dengan Pandemi Covid-19. Pada 11 Maret 2020 hingga 23 April 2020, lebih dari 2.000.000 kasus COVID-19 telah dilaporkan di lebih dari 210 negara dan wilayah, mengakibatkan lebih dari 195,755 orang meninggal dunia dan lebih dari 781,109 orang sembuh (World Health Organization, 2020). Indonesia adalah salah satu negara yang terkena dampak adanya pandemi Covid 19 ini dan dengan adanya pandemi Covid 19 ini Indonesia terdampak pada beberapa sektor kehidupan baik sektor formal dan sektor informal lumpuh. Sendi-sendi aktivitas masyarakat juga secara keseluruhan terganggu baik dari segi politik, sosial, budaya, ekonomi dan pendidikan. Cakupan dari gangguan akan pandemi covid-19 ini tidak hanya ada pada masyarakat di perkotaan atau pemerintah pusat namun juga pada pemerintahan daerah khususnya di desa-desa (Abikusna, 2020).

Dampak dari adanya pandemi covid-19 ini membuat masyarakat mengalami perubahan sosial yang harus dijalani yakni masyarakat dibatasi untuk melakukan aktivitas atau kegiatan di luar rumah seperti biasanya, sehingga masyarakat lebih banyak melakukan aktivitas di dalam rumah. Adanya kebijakan pemerintah mengenai covid-19 tentang *social distancing* (Pembatasan sosial), merupakan tindakan pengendalian yang dilakukan untuk mengurangi penyebaran covid-19. Masyarakat diharuskan untuk tidak melakukan atau mengadakan kegiatan yang dapat menimbulkan keramaian atau kerumunan guna mengurangi penyebaran

covid-19 sehingga masyarakat harus membatasi segala bentuk kegiatan termasuk dalam kegiatan pemerintahan (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 2019).

Menurut Kamal (2020) desa sebagai unit pemerintahan terendah di bawah kecamatan dalam prakteknya berhubungan langsung dengan masyarakat. Kepala desa mempunyai peran penting secara aktif membina dan menempatkan para aparatur desa untuk meningkatkan produktivitas. Kepala desa merupakan komponen yang berpengaruh dalam meningkatkan produktivitas kinerja. Serta bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan kantor desa, administrasi, pembinaan aparatur desa dan pendayagunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana desa. Hal tersebut menjadi lebih penting sejalan dengan semakin kompleksnya tuntutan tugas kepala desa, yang menghendaki dukungan kinerja yang semakin efektif dan efisien.

Menurut Kusnahadjani (2015) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengkonstruksi kewenangan desa dalam pasal 18, yang meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Adapun di pasal 19 Kewenangan Desa meliputi: a. kewenangan berdasarkan hak asal usul; b. kewenangan lokal berskala Desa; c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah,

Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indonesia merupakan negara lebih dari tiga perempat penduduknya tinggal di daerah pedesaan, sehingga selalu menjadi masalah dalam koordinasi antara pusat dan daerah sehingga daerah diberikan wewenang melalui kepala daerah untuk mengatur beberapa urusan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Desa Mulyoagung merupakan salah satu desa yang terkena dampak pandemi covid-19 pada tahun 2020. Pembangunan di desa Mulyoagung harus tertunda akibat adanya pandemi covid-19. Namun pembangunan yang tertunda tersebut dialihkan semua untuk penanganan covid-19. Selama pandemi covid-19 ini dalam menjaga partisipasi, masyarakat desa Mulyoagung masih melakukan kegiatan gotong royong seperti membantu pemerintah dan staff desa untuk suplay makanan jika ada masyarakat Mulyoagung yang terkena covid dan menjalani isolasi mandiri.

Pemerintah dan staff desa Mulyoagung berupaya agar masyarakat yang terkena dampak covid-19 dapat mendapatkan pelayanan yang baik. Masyarakat yang menerima bantuan langsung tunai adalah masyarakat miskin yang terkena dampak ekonomi akibat covid-19, warga miskin yang kehilangan pekerjaan akibat covid-19, dan warga mempunyai penyakit kronis. Teknis pembagian BLT dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan dengan mengundang penerima BLT secara bergiliran, tempat duduk yang berjarak, serta diwajibkan mencuci tangan sebelum memasuki ruangan dan wajib menggunakan masker sesuai dengan protokol kesehatan.

Untuk menguatkan fenomena empirik pada penelitian ini, peneliti melakukan pra penelitian. Berdasarkan data pra penelitian yang telah peneliti ajukan dengan pertanyaan “ sebutkan desa mana yang paling terdampak covid di kecamatan Dau”. Dalam survei di Kecamatan Dau Kabupaten Malang, peneliti mencoba bertanya terhadap 30 orang anggota pengurus kecamatan Dau termasuk Camat dan jajarannya dan mendapatkan hasil sebagai berikut :

Tabel 1.1 Data Survei Pra Penelitian

No	Desa	Voteing
1	Mulyoagung	18
2	Sumbersekar	7
3	Landungsari	2
4	Kalisongo	2
5	Karangwidoro	1

Sumber : *Wawancara Singkat diolah, 2022*

Berdasarkan wawancara kepada kepala desa Mulyoagung, permasalahan yang terjadi pada masa pandemi terletak pada bantuan dan kebijakan yang diturunkan pemerintah pusat yang sangat lama sehingga pemerintah desa mengusulkan untuk mengalokasikan sedikit dana desa untuk bantuan terhadap masyarakat yang positif covid 19 dan melakukan isolasi mandiri. Faktor penghambat dan yang menjadi permasalahan kepala desa dalam hal pelaksanaan tugas pemerintah desa diantaranya ialah kecemburuan sosial, dengan adanya bantuan yang kecil dari pemerintah pusat membuat permasalahan tersendiri di masyarakat, hal ini dikarenakan karena pembagian bantuan yang terkadang kurang merata. Kemudian berkembang asumsi dari masyarakat terkait dengan bantuan yang seharusnya dibagi rata. Kecemburuan inilah yang membuat sebagian masyarakatnya sering berada.

Pemerintah desa berupaya untuk tetap melakukan musyawarah agar masyarakat dapat terus menjaga partisipasi dengan ikut terlibat dalam musyawarah desa sesuai dengan protokol kesehatan. Dalam menjaga partisipasi masyarakat harus ikut serta dalam sebuah proses pembangunan. Peran seorang pemimpin sangat dibutuhkan dalam menunjang segala bentuk partisipasi masyarakat. Dengan adanya komunikasi yang baik antara seorang pemimpin dan masyarakatnya maka pembangunan yang akan dilaksanakan akan berjalan dengan baik, serta dalam hal tersebut masyarakat dapat ikut berpartisipasi.

Dilansir dari [Suaraindonesia.co.id](http://Suaraindonesia.co.id) (2021) bahwa Kepala Desa Mulyoagung Suheri turut angkat bicara menyampaikan bahwa kondisi Desa Mulyoagung saat ini mulai membaik dan bangkit. Desa Mulyoagung yang sebelumnya merupakan Desa yang warganya lebih awal terpapar Covid-19 ternyata memiliki semangat gotong royong yang tinggi dalam menghadapi pandemi Covid-19. Dalam wawancara singkat media Suara Indonesia bersama kepala Desa juga membeberkan bahwa Desa Mulyoagung merupakan desa di Kabupaten Malang yang mendapat predikat desa terbaik dalam penanganan Covid-19 oleh pemerintah Kabupaten Malang. Predikat desa terbaik dalam penanganan Covid-19 ini tentunya tidak lepas dari adanya pengambilan keputusan dan kepemimpinan yang baik dari kepala Desa Mulyoagung beserta jajarannya.

Dilansir dari situs [suaraindonesia.co.id](http://suaraindonesia.co.id) (2021) Pemerintah Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, hingga saat ini masih tetap giat melakukan kampanye pencegahan penularan Covid-19. Kecamatan Dau yang sebelumnya menjadi titik awal pertama penyebaran Covid-19 di Kabupaten Malang ini tetap aktif melakukan

3M dan 3T. Lutfi selaku Sekretaris Kecamatan Dau juga mengkonfirmasi bahwa Kecamatan Dau setiap hari mengalami penurunan presentase warga yang terpapar. Sekretaris Kecamatan Dau ini berharap, meskipun ditengah kondisi pandemi, perlu adanya pengembangan usaha mikro agar perekonomian tetap stabil. Kepala Desa Mulyoagung yang ditemui awak media ini di ruang kerjanya menyampaikan bahwa kondisi Desa Mulyoagung saat ini mulai membaik dan bangkit. "Desa Mulyoagung saat ini sudah berangsur-angsur membaik. Sebagai Kepala Desa, saya melihat semangat masyarakat untuk bangkit pasca terjangan pandemi ini sangat luar biasa," kata Suheri.

Suheri juga menyampaikan bahwa Desa Mulyoagung yang sebelumnya merupakan Desa yang warganya lebih awal terpapar Covid-19 ternyata memiliki semangat gotong royong yang tinggi dalam menghadapi pandemi Covid-19. "Desa Mulyoagung memang lebih awal terpapar pandemi, tapi dengan musibah ini semangat gotong royong dan persatuannya makin kokoh. Ada satu dusun di Mulyoagung ini yang warganya sampek ngumpulin sembako untuk membantu pasien yang menjalani karantina mandiri dirumahnya," terangnya. Dalam wawancara singkat bersama Kepala Desa yang di kenal rendah hati ini juga membeberkan bahwa Desa Mulyoagung merupakan desa di Kabupaten Malang yang mendapat predikat desa terbaik dalam penanganan Covid-19 oleh pemerintah Kabupaten Malang.

Dilansir dari *malangtimes.com* Kampung tangguh Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang catatkan keberhasilan dalam mengentaskan psikologis masyarakat akibat dampak persebaran Covid-19. Hal itu terlihat dari tidak

terdapat lagi catatan pasien positif Covid-19 di Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau yang notabene merupakan persebaran pertama kali di Kabupaten Malang yang juga dalam satu keluarga. Keberhasilan itu juga dibantu dengan terbentuknya Kampung Tangguh yang terdapat di Desa Mulyoagung. Kampung tersebut diinisiasi oleh beberapa orang yang terus melakukan komunikasi dengan Camat Dau untuk segera membuat gerakan yang dapat memulihkan kondisi psikologis masyarakat yang panik terhadap adanya tetangganya yang positif Covid-19.

Menurut Hidayatullah (2017) kepemimpinan merupakan faktor yang sangat penting dalam memegang peranan sebuah organisasi, agar organisasi dapat mencapai tujuannya. Dalam konteks penanggulangan krisis (*crisis management*), faktor kepemimpinan memegang peranan yang sangat krusial. Sebagai usaha dalam menangani dampak ekonomi yang sedang terjadi, pemerintah Indonesia menyiapkan dana untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19, terutama masyarakat menengah ke bawah. Dana tersebut akan dibagikan kepada masyarakat yang terdampak pandemik Covid-19 melalui program yang tertulis dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/Huk/2020 Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako Dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

UU nomer 6 tahun 2014 Pasal 26 tentang Kepala Desa menjelaskan bahwa:

- 1) Kepala desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
  - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
  - d. menetapkan Peraturan Desa;
  - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
  - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
  - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
  - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
  - k. mengembangkan kehidupan sosial budayamasyarakat Desa;
  - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
  - m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
  - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian, data pra penelitian dan prestasi kebangkitan desa Mulyoagung terhadap keterpurukannya saat pandemi covid-19 di atas maka peneliti merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Kepemimpinan Kepala Desa di Dalam Melaksanakan Tugas Pemerintahan di Masa Pandemi (Studi Kasus Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang)”**.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Dari akar permasalahan yang sudah dijabarkan sebelumnya, maka rumusan masalah yang ingin di teliti oleh penulis yaitu :

1. Bagaimana kepemimpinan kepala desa dalam melaksanakan tugas pemerintahan di era pandemi Covid-19 di Desa Mulyoagung?
2. Apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung berjalannya tugas pemerintahan di era pandemi Covid-19 di Desa Mulyoagung?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian akan memiliki suatu tujuan dari penelitian tersebut. Hal ini sangat diperlukan untuk bias menjadikan acuan bagi setiap kegiatan penelitian yang akan dilaksanakan. Karena tujuan tersebut merupakan salah satu dari tolak ukur dan menjadi sebuah target dari kegiatan penilaian tersebut. Dengan seperti itu maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana kepemimpinan kepala desa dalam melaksanakan tugas pemerintahan di era pandemi Covid-19 di Desa Mulyoagung

2. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung berjalannya tugas pemerintahan di era pandemi Covid-19 di Desa Mulyoagung

#### 1.4. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian pastinya memiliki manfaat tersendiri untuk menindak lanjuti dari apa yang telah dirumuskan dalam tujuan penelitian tersebut. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Manfaat akademis, dari segi akademis yaitu sebagai salah satu sumbangan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan sehingga menambah wawasan penulis khususnya pada sektor pengelolaan desa.
2. Manfaat praktis, yakni sebagai sumbangan/masukan pemikiran bagi masyarakat setempat terutama dalam kepemimpinan di Desa Mulyoagung
3. Manfaat subjektif, yakni sebagai suatu tahap pelatihan dan pengembangan kemampuan berpikir ilmiah serta kemampuan untuk menuangkan pemikiran tersebut dalam bentuk karya ilmiah berdasarkan kajian-kajian teori dan aplikasi yang diperoleh dari bidang ilmu administrasi publik.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bab sebelumnya maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut

1. Kepemimpinan kepala desa di dalam melaksanakan tugas pemerintahan di masa pandemi Covid-19 di desa Mulyoagung kecamatan Dau kabupaten Malang
  - a) Kebijakan BLT-Dana Desa kepada masyarakat miskin terdampak Covid-19 di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang mencakup kelompok sasaran dalam hal ini keluarga miskin merupakan tujuan utama kebijakan dan tersalurkan dengan baik karena adanya data yang akurat tentang calon penerima bantuan.
  - b) Adanya kampung tangguh Mulyoagung yang menjadi gagasan kepala desa beserta jajarannya mampu mengatasi psikologis masyarakat akibat dampak pandemi Covid-19
  - c) Pemerintahan desa Mulyoagung kecamatan Dau kabupaten Malang sudah memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat melalui media online maupun secara langsung tanpa mengabaikan protokol kesehatan.
2. Faktor penghambat berjalannya tugas pemerintahan di era pandemi Covid-19 di desa Mulyoagung kecamatan Dau kabupaten Malang yaitu:
  - a) Pembangunan infrastruktur desa menjadi terhambat karena dana dialihkan untuk menangani masyarakat yang terdampak Covid-19 tidak semua

masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 memperoleh bantuan karena alokasi anggaran yang tidak mencukupi

- b) Dalam pelayanan masyarakat secara online pemerintah desa Mulyoagung kurang adanya informasi yang terkait dengan pelayanan, untuk pelayanan secara langsung kurangnya kesadaran masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan, misalnya masih terjadi kerumunan dan tidak menjaga jarak. Pelayanan secara online masyarakat kurang faham dan masih gaptek dan kurangnya informasi yang diperoleh tentang pelayanan publik melalui media online.
3. Faktor pendukung berjalannya tugas pemerintahan di era pandemi Covid-19 di desa Mulyoagung kecamatan Dau kabupaten Malang yaitu:
- a) BLT-DD sudah tersalurkan dengan baik sesuai sasaran karena data yang lengkap dan akurat dari calon penerima bantuan.
  - b) Adanya kampung tangguh Mulyoagung yang bisa membantu menstabilkan psikologis warga akibat Covid-19. Kampung tangguh Mulyoagung terbukti efektif karena peranserta masyarakat dan kesadaran masyarakat untuk gotong-royong membantu masyarakat yang terdampak Covid-19 dan mampu menekan penyebaran virus Covid-19.
  - c) Dalam pelayanan masyarakat di masa pandemi Covid-19 desa Mulyoagung sudah memiliki media sosial dan situs web desa layanan dalam sistem online memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat sehingga dapat mempermudah masyarakat dalam pengisian dokumen yang dibutuhkan tanpa

harus datang ke kantor desa, masyarakat hanya datang ke kantor desa ketika persuratan yang di urus sudah selesai.

## 5.2 Saran

- 1) BLT-Dana Desa haruslah mengena dan bermanfaat bagi kelompok sasaran dalam hal ini keluarga miskin yang terkena dampak adanya pandemi Covid-19. Untuk itulah aparat terkait harus benar-benar mengawasi proses penyaluran bantuan tersebut termasuk pengawasan terhadap penggunaan uang bantuan tersebut oleh keluarga miskin penerima bantuan. Jangan sampai uang tunai bantuan tersebut disalah gunakan untuk hal-hal yang tidak menjadi kebutuhan pokok keluarga. Bila perlu diterapkan sanksi bagi yang melanggar dengan memutus bantuan untuk periode berikutnya.
- 2) Pelaksana kebijakan BLT-Dana Desa tersebut khususnya ditingkat desa hendaknya memaksimalkan faktor pendukung dan meminimalisir hambatan yang terjadi supaya kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar serta tepat sasaran dan tujuan.
- 3) Masyarakat yang lebih memahami akan bahayanya Covid-19 ini untuk bisa membantu lebih memahamkan lagi kepada masyarakat yang belum tahu atau belum paham terkait Covid-19. Karena kerjasama ini memang dibutuhkan untuk bagaimana bisa memutus rantai penyebaran Covid-19.
- 4) Pelayanan masyarakat melalui media online seharusnya diberikan informasi yang jelas tentang layanan, syarat, mekanisme sehingga dapat mempermudah masyarakat dalam memperoleh layanan secara online.

Begitu juga dalam pelayanan masyarakat secara langsung jangan mengabaikan protokol kesehatan.





## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU, JURNAL, DAN SKRIPSI

- Abikusna, R. A. (2020). *Kewenangan Desa Dalam Penanggulangan Wabah Covid-19*. SOSFILKOM: Jurnal Sosial, Filsafat Dan Komunikasi, 14(02), 25-38.
- Agung Kurniawan (dalam Habani Pasolong 2013:128) *Teori Administrasi Publik*. CV Alfabeta, Bandung
- Alberch dalam Lovelock, 1992 (dalam Sedarmayanti 2010:243) *Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia*. Jakarta :Kencana
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Asshidique*, Jimly (2010) *Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Azizi, C. N. (2021). *Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pengelolaan Bantuan Sosial Tunai di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Studi Kasus Desa Muntang Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga) (Doctoral dissertation, Universitas Jenderal Soedirman).
- Cholid Narbuko, A. (2010). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Gery Yuki, *Kepemimpinandalam organisasi: Edisi kelima* (leadership In Organization), (Jakarta, PT. Indeks, 2010), h.6
- Gronroos (dalam Ratminto dan Atik Septi Winarsih 2013:2). *Manajemen Pelayanan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Hidayatullah, " *Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Motivasi kerja Terhadap Kinerja pegawai di Kantor Desa Cilopadang*, Program Studi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Bangsa, 2017, 9-32.
- Hurlock, E.B 1979. *Personality Development*. New Delhi: Tata Mc.Graw- Hill Publissing Company Limited
- Hurlock, E.B. 1979. *Personality Development*. New Delhi: Tata Mc.Graw- Hill Publishing Company Limited.
- Kamal, " *Analisis Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Produktivitas Kinerja Aparatur Pemerintah Desa (Di Gampong Lamgugob Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)*", Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar – Raniry Darussalam Banda Aceh, 2020, 12- 33.
- Kushandajani, *Kewenangan Desa dan Penyelenggaraan Demerintahan Desa dalam Perspektif Undang-Undanga Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*,

Semarang: Departemen Politik dan Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro, 2018. h.1

Lippit And White. 1939. *Pola Perilaku Agresif di Iklim Sosial Eksperimental*. Social Psychology Journal, Vol 10, 271-30.

Moleong, L. J. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung; Remaja Posadakarya

Moleong, Lexy J. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Posdakarya.

Monir (dalam Harbani Pasolong 2013:128). *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Jakarta: PT Bumi Aksara 2014

Nugrahani, Farida. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books

Panji Santosa 2009:57. *Teori dan Aplikasi Good Governace*. Refika Asitama: Bandung

Reksohadiprodjo, Sukanto, Handoko, T.Hani. (2001). "*Organisasi Perusahaan*". Yogyakarta : BPFE

Rivai, Veithzal. (2010). *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi* (Ed. 3). Jakarta : Rajawali Pers.

Sedarmayanti, 2010, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*, cetakan kedua, penerbit: Mandar Maju. Bandung.

Sedarmayanti. 2010. *Reformasi Administrasi Publik*, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan. Bandung : Refika Aditama.

Sinambela (dalam Harbani Pasolong 2013:128) *Reformasi Pelayanan Publik*: Bumi Aksara

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung; Alfabeta

Thoha (dalam Sedarmayanti 2010:243) *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Mandar Maju. Bandung

Usman, Husaini. 2011. *Management: Teori Praktek dan Riset Pendidikan* Yogyakarta Bumi Aksara Edisi Ke Tiga

Widjaja, HAW. 2003. *Pemerintah Desa*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Widjaja. 2003. *Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Wisadirana, Darsono. (2005) *Metode Penelitian dan Pedoman Penulisan Skripsi*. Malang, UMM Press

#### **MEDIA ONLINE / INTERNET:**

<http://malangtimes.com>: *Upaya Kampung Tangguh Mulyoagung Menstabilkan Psikologis Warga Akibat Covid*.

<https://suaraindonesia.co.id> Mulyoagung merupakan desa di kabupatrn Malang yang mendapat predikat desa terbaik dalam penanganan Covid-19 oleh pemerintah kabupaten Malang

<http://suaraindonesia.co.id>: Desa Mulyoagung Jadi Titik Awal Penyebaran Covid.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

RI, M. (t.thn.). *Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa*.

PP No 72 Tahun 2005 Tentang BPD

Kepmen Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pelayanan Publik

Kemendes PDTT Tahun 2021 tentang penanganan Covid-19